

BAB IV

***COUNTER-DISCOURSE GROSS NATIONAL HAPPINESS* SEBAGAI ALTERNATIF INDEKS PEMBANGUNAN GLOBAL**

Ketika mayoritas negara di dunia lebih mengutamakan pembangunan ekonomi dengan GDP sebagai indikator keberhasilan pembangunannya, Bhutan memilih untuk mengutamakan *Gross National Happiness*. Meskipun demikian, Bhutan tetap konsisten untuk mempromosikan GNH sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang tidak hanya baik bagi Bhutan, tetapi juga negara-negara lain di dunia. Oleh karena itu bab ini akan berfokus pada pertentangan antara indikator keberhasilan pembangunan global *Gross National Happiness (GNH)* dengan *Gross Domestic Product (GDP)*, yang akan terbagi menjadi tiga pokok bahasan. Pertama yaitu GDP sebagai indeks pembangunan global yang bermasalah dan gagal dalam mengukur kebahagiaan. Kedua yaitu usaha-usaha Bhutan dalam memperkenalkan *Gross National Happiness* ke dunia internasional melalui beberapa kebijakannya. Ketiga yaitu penjabaran tentang berbagai bukti nyata terjadinya *counter-discourse* dan hadirnya GNH sebagai alternatif indeks pembangunan yang ditawarkan Bhutan.

4.1 Kegagalan *Gross Domestic Product* Dalam Mengukur Kebahagiaan

Pembangunan ekonomi merupakan diskursus pembangunan global yang digunakan oleh mayoritas negara di dunia. Dengan menggunakan GDP negara-negara tersebut bisa mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah mereka canangkan. Turun naiknya tren pertumbuhan ekonomi pun menjadi rujukan dan bahan pertimbangan utama dari pemerintah negara untuk menentukan kebijakan apa yang

harus dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan pembangunan, maupun untuk meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi yang sudah baik. Meskipun demikian penggunaan GDP mendapat banyak kritik. GDP dianggap tidak terlalu cocok digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan, karena ketidakmampuan dalam mengukur aspek-aspek kehidupan (Drabsch, 2012).

Asumsi yang berkembang adalah negara kaya dengan perekonomian maju, pertumbuhan ekonomi pesat, dan GDP yang tinggi, akan berdampak pada peningkatan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat negara tersebut. Secara tidak langsung hubungan kausal yang terjadi adalah apabila GDP tinggi, maka masyarakat akan sejahtera dan bahagia. Asumsi ini berkaitan dengan pemahaman umum bahwa kesejahteraan dapat diperoleh melalui aktivitas konsumsi, seperti makanan, rumah, pakaian, hiburan, dan berbagai hal lainnya (Conceição & Bandura, 2008). Ketika kesejahteraan tercapai, maka akan timbul kebahagiaan. Karena pemahaman inilah GDP dianggap bisa mengukur kebahagiaan. Namun hal ini mulai diragukan oleh Moses Abramovitz melalui esei yang ia tulis dengan judul "*The Welfare Interpretation of National Income and Product*". Abramovitz menyimpulkan bahwa kita harus skeptis terhadap pandangan bahwa peningkatan kesejahteraan dapat diukur dengan hitungan kasar, seperti salah satunya pendapatan (Easterlin, 1974). Pendapat Abramovitz ini terjawab dari hasil penelitian yang dipublikasikan oleh Richard A. Easterlin pada tahun 1974 (Drabsch, 2012).

Richard A. Easterlin merupakan seorang profesor di University of Southern California (USC Dornsife, 2018). Ia dikenal dengan *Easterlin Paradox*-nya yang secara garis besar menyatakan bahwa negara yang semakin kaya tidak akan menjamin masyarakatnya semakin bahagia (Hafsah, 2017). Bahwa kebahagiaan dan pendapatan setiap negara berbeda,

namun peningkatan pendapatan tidak selalu diiringi dengan peningkatan tingkat kebahagiaan (Economic and Social Research Council, 2018). Menurut Andrew E. Clark dan Claudia Senik dalam tulisan mereka yang berjudul “*Will GDP growth increase happiness in developing countries?*”, terdapat dua alasan mengapa hal ini disebut paradoks. Pertama yaitu karena perbedaannya dengan pemahaman awam, bahwa ketika memiliki banyak materi dan hak memilih lebih besar, maka akan mendorong kesejahteraan dan kebahagiaan (Clark & Senik, 2011). Kedua, yaitu karena data yang disajikan berbanding terbalik dengan data yang ada di internal berbagai negara (Clark & Senik, 2011).

Paradoks ini terkenal saat Richard D. Easterlin mempublikasikan hasil penelitian dengan judul “*Does Economic Growth Improve the Human a Lot? Some Empirical Evidence*” pada tahun 1974. Paradoks ini didasari atas data penelitian *NORC Polls* yang meneliti distribusi kebahagiaan di tiga tahun berbeda, yaitu tahun 1957, 1963, dan 1965 (Easterlin, 1974). Hasilnya, kebahagiaan warga Amerika Serikat justru semakin menurun. Dengan salah satu kategorinya “sangat bahagia” dari 35 di tahun 1957, 32 di tahun 1963, menjadi 30 di tahun 1965 (Easterlin, 1974). Padahal GDP Amerika Serikat di tiga tahun tersebut cenderung terus mengalami kenaikan, yaitu 2.994 triliun dolar di tahun 1957, 3.703 triliun dolar di tahun 1963, dan 4.171 triliun dolar di tahun 1965 (Amadeo, 2018).

Tabel 4.1 Tingkat kebahagiaan dan pendapatan setiap individu di 14 negara pada tahun 1960

Country	Period of survey	(1) Rating of personal happiness (min: 0; max: 10)	(2) Real GNP per head 1961 (U.S.)
United States	Aug. 1959	6.6	2790
Cuba	Apr.–May 1960	6.4	516
Egypt	Fall 1960	5.5	225
Israel	Nov. 1961–June 1962	5.3	1027
West Germany	Sept. 1957	5.3	1860
Japan	Fall 1962	5.2	613
Yugoslavia	Spring 1962	5.0	489
Philippines	Spring 1959	4.9	282
Panama	Jan. –Mar. 1962	4.8	371
Nigeria	Sept. 1962–spring 1963	4.8	134
Brazil	Late 1960–early 1961	4.6	375
Poland	Spring 1962	4.4	702
India	Summer 1962	3.7	140
Dominican Republic	Apr. 1962	1.6	313
Average		5.0	

Sumber: *“Does Economic Growth Improve the Human a Lot? Some Empirical Evidence”* oleh Richard A. Easterlin.

Selain itu, dalam publikasi Easterlin tersebut juga terdapat hasil penelitian yang menunjukkan perbandingan kebahagiaan dan pendapatan di 14 negara. Seperti yang tertera dalam tabel 4.1, terdapat beberapa negara yang menjadi representasi negara maju, seperti Amerika Serikat dan Italia, serta negara berkembang seperti Filipina dan Nigeria. Dari data tersebut dapat terlihat bahwa tingginya angka pendapat tidak linear dengan tingkat kebahagiaan. Contohnya adalah Amerika Serikat yang pendapatan per orang mencapai 2.790 dolar memiliki indeks kebahagiaan sebesar 6.6 (Easterlin, 1974). Di sisi lain terdapat Kuba dengan pendapatan per orang hanya mencapai 516 dolar, yang kurang lebih 1/5 dari

pendapatan per orang di Amerika Serikat. Namun dari penelitian tersebut Kuba bisa menempati posisi kedua sebagai dalam tingkat kebahagiaannya dengan indeks 6.4 (Easterlin, 1974). Padahal, masih ada Israel, Jerman Barat, yang pendapatan per orang lebih tinggi dari Kuba, yang masing-masing memiliki indeks kebahagiaan yang sama yaitu 5.3 (Easterlin, 1974). Hasil penelitian ini menjadi penguat bahwa negara kaya tidak selalu bahagia dan tidak selalu lebih bahagia dari negara yang miskin atau memiliki tingkat pendapatan yang lebih rendah. Fakta ini dapat diperkuat dengan sebuah bab dalam *World Happiness Report 2017* yang berjudul “*Restoring American Happiness*” (Helliwell, Layard, & Sachs, 2017). Dimana dalam bab tersebut ditunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2006-2016, indeks kebahagiaan warga Amerika Serikat cenderung menurun dari 7.35 di tahun 2006 menjadi 6.83 di tahun 2016 (Helliwell, Layard, & Sachs, 2017). Padahal GDP Amerika Serikat meningkat dari tahun 2006 sebanyak 15.338 triliun dolar menjadi 17.659 triliun dolar di tahun 2016 (Amadeo, 2018).

Selain paradoks yang dikemukakan oleh Easterlin, dukungan ini juga tidak lepas dari Bhutan yang mulai memperkenalkan GNH ke dunia internasional. GDP dianggap hanya mengukur kualitas pembangunan dari segi ekonomi, tanpa melibatkan aspek lingkungan, budaya, maupun kualitas hidup manusia (Fidelis, Tisott, & Rodrigues, 2017). Bahkan GDP dianggap hanya “peduli” dengan hal-hal yang justru tidak mendorong terciptanya kebahagiaan bagi suatu masyarakat (Edahiro, 2017).

4.2 Perspektif *Counter-Discourse* oleh Michael Foucault

Fenomena ini juga dapat dianalisis menggunakan sudut pandang *counter-discourse* milik Michael Foucault yang menghadirkan konsep *regime of truth* dan *game of truth*.

Menggunakan pandangan kritis Michael Foucault, pembangunan ekonomi beserta GDP sebagai indikator pembangunan dinilai hanya menciptakan iklim pendisiplinan negara yang diciptakan oleh negara-negara Barat. Belum lagi adanya *labelling* keberhasilan pembangunan ekonomi, yang semakin memperkuat pembangunan ekonomi sebagai diskursus tunggal pembangunan yang menghegemoni (Collins, 2016). Dengan acuan yang dipercaya oleh mayoritas negara di dunia, pembangunan ekonomi perlahan terkonstruksi menjadi sebuah solusi terbaik dari segala permasalahan pembangunan. GDP sebagai indeks pembangunan pun digunakan sebagai rujukan dalam perencanaan pembangunan, rasionalisasi dan evaluasi program pembangunan, dan indikator berhak tidaknya suatu negara mendapat bantuan pembangunan (Haque, 2004).

Meminjam istilah dari Michael Foucault, pembangunan ekonomi dengan GDP sebagai indikator keberhasilan pembangunannya yang menghegemoni ini dapat disebut sebagai sebuah *regime of truth*. Bahwa pembangunan ekonomi dengan sistem dan indeks yang ada di dalamnya tidak lebih dari sebuah mitos, yang kebenarannya secara politis di desain oleh negara-negara Barat. Terbukti dengan penggunaan *gold standard* sebagai sebuah sistem ekonomi yang pertama kali mendasari terbentuknya diskursus pembangunan ekonomi. Dimana dengan sistem tersebut Inggris ingin lebih mengontrol ekonomi negara-negara di dunia (Igwe, 2018). Peningkatan tingkat investasi hingga peningkatan pendapatan negara pun menjadi tolok ukur kesejahteraan negara. Belum lagi dengan adanya narasi bahwa semakin tinggi tingkat konsumsi maka akan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan (Pettinger, 2016). Ketika suatu negara telah terjebak dalam narasi tersebut, maka mau tidak mau mereka akan masuk aturan main dari diskursus pembangunan ekonomi, yang diagungkan oleh negara-negara Barat untuk mengatur perekonomian dan

pembangunan di dunia. Apabila kembali meminjam istilah dari Michael Foucault, hal ini disebut sebagai *game of truth*. Yaitu aturan main yang baik langsung maupun tidak langsung tercipta dari pembangunan ekonomi sebagai sebuah *regime of truth*.

Termasuk kehadiran *World Bank* dan IMF dalam aturan main tersebut, yaitu sebagai institusi yang diposisikan sebagai “dewa penolong” ketika ada negara yang merasa kesulitan dalam mengejar target keberhasilan pembangunan GDP yang berorientasi pada hal-hal bersifat materialistik. Dimana pendidikan, kesehatan, hingga kelayakan tempat tinggal tidak termasuk dalam pengukuran GDP (Dang & Pheng, 2015). Akibatnya, aspek lain seperti lingkungan dan manusia pun terabaikan dalam agenda pembangunan, yang bahkan mendapat dampak negatif dari pembangunan yang dicanangkan. Bagi lingkungan, pembangunan yang tidak terkontrol dan berorientasi materialistik hanya akan menyebabkan konflik sumber daya alam, perubahan iklim, dan kepunahan spesies tumbuhan dan hewan akibat kerusakan habitat (Czech, 2015). Sedangkan bagi manusia, hal tersebut akan berdampak buruk pada pembangunan manusia (*human development*). Seperti yang disebutkan dalam tulisan berjudul “*The Myths of Economic Growth (GNP): Implications for Human Development*” yang ditulis oleh M. Shamsul Haque. Bahwa pembangunan ekonomi mendorong terjadinya eksploitasi pekerja, komodifikasi manusia, dan mengurangi kualitas hidup individu manusia (Haque, 2004).

Bahkan pemberian bantuan keuangan oleh *World Bank* dan IMF kepada negara berkembang tanpa adanya arah kebijakan dan *rule of law* yang jelas hanya menambah beban hutang negara (Eiras, 2003). Dengan dampak semakin terhambatnya pembangunan di negara tersebut. Pendekatan solusi pembangunan yang menurut Joseph Stiglitz dalam

tulisan Scott A. Beaulier bersifat “*one-size-fits-all*” pun juga menjadi permasalahan tersendiri, mengingat setiap negara menghadapi permasalahan yang berbeda-beda (Beaulier, 2004). Sehingga, kebahagiaan warga negara yang seharusnya didapat dari agenda pembangunan menjadi tidak terpenuhi. Padahal jika dilihat dari sudut pandang GNH, kebahagiaan harus memenuhi empat pilar utama, yaitu pembangunan sosial ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, konservasi lingkungan, pelestarian dan promosi kebudayaan, dan *good governance*. Sedangkan akibat negara yang berfokus pada target GDP membuat keempat pilar tersebut tidak dapat dipenuhi sebagai sebuah pondasi awal dari pembangunan yang mendorong terciptanya kebahagiaan.

4.2.1 Pembangunan Sosial Ekonomi Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Bagi negara yang menganut pembangunan ekonomi, mau tidak mau mereka harus mengikuti aturan main rezim ekonomi internasional. Negara-negara tersebut harus memenuhi syarat tertentu agar mampu memenuhi target GDP untuk dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Salah satunya yaitu dengan membuka sebesar-besarnya peluang investasi dan masuknya perusahaan asing ke dalam suatu negara. Namun keterbukaan yang diharapkan mampu membawa kesejahteraan justru menimbulkan permasalahan baru dan membuat gap ekonomi semakin lebar. Salah satu contohnya adalah kehadiran perusahaan kopi *Starbucks* di Ethiopia. Dimana kehadiran mereka tidak lepas dari kebutuhan negara untuk menciptakan kesejahteraan dengan memaksimalkan komponen GDP, seperti konsumsi sektor privat, investasi, dan ekspor (Madalina, 2015). *Starbucks* membayar murah tenaga yang bekerja

di kebun dan membeli harga hasil perkebunan masyarakat Ethiopia dengan sangat rendah (Moyo, 2014). Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil perkebunan kopi penduduk Ethiopia hanya dihargai sebesar 1.45 dolar Amerika per kilogram oleh *Starbucks* (Faris, 2007). Di sisi lain *Starbucks* menjual kopi dari perkebunan Ethiopia ini, yang salah satunya kopi olahan dengan nama *Shirkina Sun-Dried Sidamo*, dengan harga per bungkusnya sebesar 26 dolar Amerika (Faris, 2007). Akibat adanya praktik ini, menurut Oxfam kehadiran *Starbucks* di Ethiopia telah merugikan petani kopi di negara tersebut sebanyak 90 juta dolar Amerika per tahunnya (The Economist, 2006). Tindakan *Starbucks* ini menuai kecaman dari berbagai pihak. Puncaknya terjadi ketika terjadi kampanye protes di London pada tahun 2007 yang dipimpin oleh Tadesse Meskala, pimpinan *Oromia Coffee Farmers Cooperative Union* di Ethiopia (Seager, 2007).

Belum lagi kasus yang terjadi di China, ketika pemerintah China mengeluarkan pengaturan mengenai *Foreign Direct Investment* (FDI) pada tahun 2017, yang berdampak pada banyaknya perusahaan yang masuk dan beroperasi di negara tersebut (Edelberg, 2017). Kebijakan ini merupakan bagian dari program pembangunan *Five Year Plan* yang dicanangkan oleh pemerintah China untuk melakukan reformasi ekonomi, termasuk implementasi *open-door policy* (Felipe, Dacuycuy, & Lanzafame, 2014). Salah satu bentuk kebijakan reformasi ini adalah *land reform*, dimana melalui kebijakan ini memungkinkan petani China untuk secara kolektif memberikan hak lahan pertaniannya kepada perusahaan. Akibatnya banyak lahan masyarakat yang sebelumnya diperuntukkan untuk bertani harus dialih fungsikan menjadi lahan perusahaan dan membuat para petani di

China kehilangan mata pencaharian. Sehingga satu-satunya cara untuk tetap mendapat pekerjaan adalah dengan bekerja di sektor industri yang telah mengambil alih lahan pertanian mereka. Bahkan pemerintah China berupaya memindahkan warganya yang berada di desa untuk kemudian dipindahkan ke kota di bawah kebijakan pembangunan *National New-type Urbanization Plan (2014-2020)* (Weller, 2015). Tujuan diadakannya urbanisasi ini yaitu agar dapat mendukung pembangunan industri yang sedang dikembangkan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi (Zhang, 2017).

Kasus ini membuktikan bahwa narasi yang dibangun oleh diskursus pembangunan ekonomi dengan indeks GDP nya cenderung membuat hubungan yang tidak sehat antara perusahaan multinasional, negara, dan masyarakat. Kehadiran perusahaan justru menjadi titik awal terjadinya eksploitasi yang menyengsarakan masyarakat. Meskipun masyarakat mendapat penghasilan, namun jumlahnya tidak seberapa dan cenderung tidak merata. Melihat kasus *Starbucks*, mereka sanggup memperoleh keuntungan hingga 88 juta dolar per tahun, yang tidak lebih rendah dari GDP Ethiopia dalam satu tahun (BBC News, 2006). Orientasi pada diskursus pembangunan ekonomi pun menyebabkan perubahan struktur dan mata pencaharian masyarakat secara paksa. Kondisi ini menunjukkan bahwa diskursus pembangunan ekonomi dengan indeks GDP-nya hanya akan memberikan keuntungan ke beberapa pihak saja, termasuk diantaranya korporasi dan negara-negara maju, serta lebih banyak menimbulkan penderitaan bagi masyarakat.

4.2.2 Konservasi Lingkungan

Meskipun suatu negara dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perekonomiannya melalui pemanfaatan sumber dalam alam secara besar-besaran, sisi keberlanjutan pun kemudian menjadi sebuah pertanyaan besar (Drabsch, 2012). Alam memang menyediakan segala bentuk sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun karena permintaan yang banyak, adanya prospek keuntungan yang tinggi, menjadikan pemanfaatan tersebut justru mengarah ke eksploitasi.

Salah satu bentuk kasus eksploitasi yang terjadi adalah deforestasi yang terjadi di Indonesia sebagai akibat dari kebutuhan perluasan perkebunan kelapa sawit. Menurut *Greenpeace*, salah satu faktor masih terjadinya deforestasi di Indonesia adalah adanya permintaan yang tinggi dari berbagai perusahaan ternama, seperti *Unilever*, *Nestlé*, dan *PepsiCo* (Jong, 2018). Tingginya tingkat deforestasi juga tidak lepas dari perluasan lahan sawit karena permintaan minyak kelapa sawit yang cukup tinggi dari berbagai negara, seperti dari negara-negara kawasan Afrika, Uni Eropa, India, dan Pakistan (Indonesia Investments, 2016). Di samping itu adanya dorongan pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan ekspor minyak kelapa sawit dari 7% menjadi 16% dari seluruh produk ekspor di tahun 2020 juga menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan hutan (Global Business Guide Indonesia, 2012). Minyak kelapa sawit pun menjadi komoditas ekspor terbesar bagi Indonesia (Yuliadi, 2018). Padahal beberapa dampak yang ditimbulkan adalah terancamnya habitat satwa, meningkatkan peluang terjadinya kepunahan, dan

meningkatnya tingkat penangkapan hewan liar (WWF, 2017). Belum lagi dengan resiko polusi udara yang mengancam penduduk setempat akibat dari pembabatan hutan melalui aktivitas pembakaran.

Selain itu kehadiran korporasi juga menyebabkan permasalahan lingkungan berupa pencemaran limbah di China, yang salah satunya terjadi di Provinsi Jiangxi. Kasus pencemaran lingkungan yang ini melibatkan beberapa perusahaan pakaian ternama dunia, seperti *Zara*, *H&M*, dan *Tesco*. Menurut laporan yang dirilis oleh *Institute of Public and Environmental Affairs*, perusahaan pakaian ternama tersebut melanggar hukum lingkungan di China dengan mencemari sumber air dalam proses pembuatannya (The Huffington Post, 2013). Limbah hasil produksi langsung dialirkan ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Akibatnya limbah dari sungai tersebut kemudian membuat danau terbesar di China, Poyang, menjadi tercemar (Hoskins, 2017). Kasus pencemaran ini mengakibatkan masyarakat Provinsi Jiangxi harus mencari sumber air lain dan merebaknya penyakit yang menjangkit penduduk sekitar.

Kasus-kasus lingkungan ini menunjukkan bahwa meskipun diskursus pembangunan ekonomi membawa keuntungan yang cukup banyak secara ekonomi, namun di sisi lain juga memiliki konsekuensi lingkungan yang cukup besar. Didorongnya kegiatan ekspor demi memenuhi kebutuhan pasar dan peningkatan indeks GDP justru hanya semakin memperburuk kondisi lingkungan. Pembangunan ini pun juga tidak memiliki sisi keberlanjutan, karena pada akhirnya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan hanya meninggalkan kerusakan lingkungan (Kinda, 2015).

4.2.3 Pelestarian dan Promosi Kebudayaan

Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang mampu menyelaraskan antara modernitas dengan kebudayaan lokal setempat. Pembangunan harus dapat berdampingan dengan kearifan lokal melalui pelestarian dan promosi kebudayaan. Kebahagiaan pun akan tercipta apabila setiap orang memiliki kesempatan untuk mempertahankan identitas budayanya (GNH Centre Bhutan, 2018). Namun dalam beberapa kasus, pembangunan justru menggeser kebudayaan. Salah satunya terjadi di Amerika Serikat dalam kasus Keystone XL.

Keystone XL merupakan proyek yang diinisiasi oleh perusahaan bernama *TransCanada*. Proyek yang telah diinisiasi sejak tahun 2008 ini dibangun dengan tujuan untuk memindahkan 830,000 barel minyak mentah per harinya, dari Alberta di Kanada hingga ke Teluk Meksiko (Offutt, 2018). Proyek ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan bagi warga Amerika Serikat. Kebutuhan ini secara tidak langsung dapat terlihat melalui pernyataan Donald Trump, yang mengatakan bahwa proyek ini akan membuka sebanyak 48,000 lapangan pekerjaan (Sputnik News, 2018). Namun proyek Keystone XL ini mendapat banyak penolakan dari banyak pihak. Termasuk masyarakat suku adat di Kanada dan Amerika Serikat yang wilayah tempat tinggalnya masuk dalam rencana pembangunan proyek tersebut (Fontaine, 2017). Padahal pada saat kepemimpinan Presiden Barack Obama, karena alasan dapat memperburuk kondisi perubahan iklim, proyek ini pernah ditolak pada tahun 2012 dan tahun 2015 (Offutt, 2018).

Menurut Heather Brady dalam tulisannya yang berjudul "*4 Key Impacts of the Keystone XL and Dakota*

Acess Pipelines”, terdapat empat dampak utama yang dapat ditimbulkan dari proyek ini (Brady, 2017). Dari keempat dampak tersebut, Brady menyatakan bahwa pembangunan proyek ini akan mempengaruhi kehidupan warga suku adat. Beberapa bentuk diantaranya adalah pencemaran air dan tanah yang sangat merugikan bagi warga setempat (Brady, 2017). Rencana pembangunan ini dikhawatirkan akan merusak wilayah tempat tinggal para suku adat yang telah mereka tinggali sejak lama. Padahal di tempat itulah mereka selama ini berternak dan bertani untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tidak hanya lingkungan dan mata pencaharian warga suku adat, pembangunan ini juga mengancam keberadaan beberapa situs budaya penting. Dua diantaranya adalah *Ponca Trail of Tears* dan *Ponca Chief Standing Bear Statue*, yang merupakan situs penting bagi Suku Indian (Indians, 2018). Dari kasus ini dapat timbul sebuah keraguan, apakah pembangunan yang diakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dan Kanada ini dapat membahagiakan masyarakat secara umum dan warga suku adat secara khusus. Karena pembangunan pipa tersebut tidak hanya merusak alam dan mata pencaharian warga suku adat, tetapi juga situs-situs bernilai sejarah yang seharusnya dilindungi dan dihormati keberadaannya.

4.2.4 Good Governance

Pemerintah suatu negara memiliki posisi dan peran penting dalam pengelolaan negara. Mereka harus dapat mengartikulasikan dan merealisasikan apa yang dikehendaki oleh rakyat. Tentu dengan tetap mempertimbangkan beberapa aspek. Tata kelola pemerintahan pun sangat berpengaruh pada bagaimana pemerintahan itu berjalan dan sejauh mana pemerintah

tersebut dapat memenuhi kepentingan masyarakat. Di sisi lain pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, memberikan kesempatan yang sama, serta menjunjung tinggi hak dan kebebasan individu (Stockdale, 2010). Oleh karena itu terdapat dua belas prinsip pemerintahan yang baik atau *good governance* yang bisa menjadi salah satu pedoman dan parameter baik tidaknya suatu pemerintahan. Setidaknya prinsip-prinsip *good governance* tersebut dapat membantu dalam pemenuhan kewajiban sebagai pemerintah. Beberapa diantara prinsip tersebut yaitu: *fair conduct of elections, representation, and participation; responsiveness; efficiency and effectiveness; openness and transparency; rule of law; ethical conduct; competence and capacity, dan innovation and openness to change* (Council of Europe, 2018).

Mewujudkan *good governance* bukan sesuatu yang mudah. Salah satunya ketika berada dalam situasi banyak negara yang menggunakan diskursus pembangunan ekonomi. Hal ini akan beresiko sulitnya mencapai *good governance*, khususnya dalam hal *ethical conduct*. Pembangunan ekonomi yang memiliki efek berupa banyaknya proyek besar dan masuknya investasi menjadi kesempatan bagi oknum pemerintah untuk melakukan tindak pidana suap maupun korupsi. Karena kondisi mereka yang miskin, kebijakan maupun ijin pun dapat dengan mudah diperjualbelikan. Apabila merujuk pada prinsip *ethical conduct*, seharusnya pemerintah lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segala dan harus menjauh dari praktik korupsi (Council of Europe, 2018). Namun yang terjadi sebaliknya, yaitu pemerintah lebih memihak kepentingan korporasi atau para pemilik

modal, daripada mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Kasus korupsi salah satunya di banyak terjadi di sebagian negara-negara kawasan Afrika (Turner, 2017). Budaya suap dan korupsi sudah merajalela, seiring dengan peningkatan masuknya korporasi di ke negaranegara Afrika. Hukum pun dengan mudah diperjualbelikan melalui praktik suap. Bahkan menurut *Transparency International*, 75 juta warga Afrika terlibat dalam dalam kasus suap (Narfeldt, 2018). Celah ini lah yang kemudian dimanfaatkan oleh banyak korporasi internasional. Yaitu dengan mudahnya mereka mendapat ijin melalui suap, meskipun tidak memenuhi standar aturan maupun prosedur yang berlaku. Sehingga banyak korporasi yang masuk dan memanfaatkan sumber daya alam negara-negara di kawasan Afrika, namun justru menimbulkan kerugian bagi lingkungan dan masyarakat lokal (Turner, 2017).

Salah satunya adalah kasus yang terjadi di Afrika Selatan yang melibatkan Presiden Jacob Zouma. Sebuah keluarga bisnis bernama Gupta melakukan suap kepada pemerintah untuk mengarahkan penunjukkan anggota kabinet, yang kemudian dimanfaatkan untuk memperoleh kontrak proyek senilai ratusan juta dolar dari pemerintah Afrika Selatan (Conway-Smith, 2017). Hal ini tidak akan terjadi apabila keluarga pebisnis tersebut tidak melihat adanya celah atau peluang. Pertama yaitu dari oknum pemerintah untuk secara mudah disuap. Kedua yaitu adanya kepentingan pemerintah Afrika Selatan untuk menarik banyak korporasi internasional dan para pemegang modal untuk pembangunan tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat.

Kondisi ini sangat bertentangan dengan salah satu prinsip *good governance*, yaitu *ethical conduct*. Pemerintah yang seharusnya mendapat kepercayaan masyarakat dalam memimpin dan mengelola negara, justru terlibat dalam praktik suap dan korupsi. Akibatnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pun berpotensi tidak memihak kepada masyarakat. Di samping itu kondisi yang terjadi ini juga tidak sesuai dengan salah satu pilar GNH sebagai pondasi untuk menciptakan kebahagiaan dalam masyarakat, yaitu *good governance*. Ketika pemerintahan tidak berjalan dengan baik, maka akan sulit untuk memenuhi aspek-aspek dalam mencapai kebahagiaan, seperti kesehatan dan pendidikan (Metz, Hirata, & Verma, 2015). Kebijakan yang berorientasi dengan kebutuhan rakyat pun menjadi sulit terealisasi, karena tidak adanya keberpihakan dan maraknya praktik suap dan korupsi. Pemerintah yang seharusnya melayani dan berpihak pada kepentingan masyarakat, justru berpihak kepada kepentingan individu, korporasi, dan para pemilik modal. Sehingga pemenuhan kewajiban sebagai pemerintah kepada rakyat pun menjadi sulit terealisasi, yang berakibat pada sulit tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4.3 Usaha Bhutan Memperkenalkan *Gross National Happiness* ke Dunia Internasional Sebagai Alternatif Indeks Keberhasilan Pembangunan Global

Dalam kerangka *counter-discourse* oleh Michael Foucault, pembangunan ekonomi beserta indeks pembangunan GDP dianggap hanya sebagai sebuah mitos dan kebenaran yang secara politis dibentuk oleh negara-negara Barat. Diskursus pembangunan ekonomi tidak lepas dari pemahaman kebahagiaan dari bangsa Barat, bahwa sumber kebahagiaan

berasal dari hal-hal yang bersifat material (Saul, 2007). Namun diskursus pembangunan ekonomi yang telah lama terbangun ternyata tidak serta merta memberikan kebaikan dan kebahagiaan bagi negara dan masyarakat yang menganutnya. Selain itu, dari penjelasan sebelumnya dapat terlihat bahwa menggunakan diskursus pembangunan ekonomi dan menjadikan indeks GDP sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan justru menimbulkan banyak permasalahan. Diantaranya permasalahan dalam aspek ekonomi, budaya, lingkungan, dan pemerintahan yang semuanya bermuara pada ketidakbahagiaan masyarakat. Hal ini pun disadari oleh Senator John F. Kennedy dalam pidatonya di University of Kansas pada tanggal 18 Maret 1968 (Drabsch, 2012):

“It (GDP) measures neither our wit nor our courage, neither our wisdom nor our learning, neither our compassion nor our devotion to our country, it measures everything in short, except that which makes life worthwhile (Drabsch, 2012).”

Tidak hanya Senator John F. Kennedy, Raja Bhutan Jigme Singye Wangchuck pun memiliki pemikiran yang sama. Pernyataannya pada tahun 1972 bahwa *Gross National Happiness* lebih penting dari *Gross Domestic Product* menjadi buktinya (Hale, 2018). Bhutan pun mulai memperkenalkan GNH ke dunia internasional sebagai sebuah indeks pembangunan sekaligus awal mula perjuangan Bhutan dalam melakukan *counter-discourse*. Diawali dari diakuinya GNH oleh PBB dalam sebuah *non-binding resolution* pada tanggal 19 Juli 2011 (United Nations, 2011). Artinya mayoritas negara-negara anggota PBB sepakat bahwa kebahagiaan menjadi salah satu bagian penting dalam pembangunan. Secara tidak langsung dengan disetujuinya *non-binding*

resolution ini membuka peluang GNH untuk menjadi alternatif indeks pembangunan selain GDP. Di samping itu, dalam rangka melakukan *counter-discourse* Bhutan juga memiliki beberapa kebijakan sebagai bentuk implementasi dari GNH. Melalui kebijakan-kebijakan ini, Bhutan juga mengajak dunia internasional untuk menerapkan pembangunan yang *people-oriented*, dengan kebahagiaan sebagai salah satu aspek utama yang perlu dipertimbangkan. GNH pun menjadi acuan utama bagaimana seharusnya pembangunan itu berjalan dan berdampak bagi masyarakat luas. Sehingga, melalui beberapa kebijakan Bhutan ini, secara tidak langsung mereka mengirimkan pesan bahwa GNH dapat menjadi alternatif indeks pembangunan. Beberapa diantara bentuk kebijakannya adalah:

4.3.1 Bhutan Water Policy

Contoh kebijakan pertama adalah *Bhutan Water Policy*. Dalam kebijakan ini Bhutan memiliki visi bahwa air harus dapat mencukupi kebutuhan saat ini dan generasi mendatang untuk menjaga kualitas hidup serta menjaga hubungan antara alam dengan manusia (Royal Government of Bhutan, 2007). Salah satu yang mendasari visi ini adalah bahwa alam, manusia, dan air saling bergantung satu sama lain dan harus bisa hidup berdampingan secara harmonis (Royal Government of Bhutan, 2007).

Bhutan sendiri memiliki banyak sumber air, seperti sungai dan danau glasial (Singh & Karki, 2004). Sebelumnya pemanfaatan sumber air ini bukanlah suatu masalah, karena hanya diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan irigasi. Namun dalam perkembangannya konsumsi kebutuhan sehari-hari dan

irigasi semakin meningkat. Belum lagi ancaman banjir dari danau glasial bagi beberapa wilayah di Bhutan sebagai efek dari perubahan iklim yang ekstrim (Royal Government of Bhutan, 2007). Oleh karena itu, kondisi ini dianggap mendesak oleh pemerintah Bhutan untuk membuat suatu manajemen pengelolaan air. Selain untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat, manajemen pengelolaan air ini penting untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Untuk itu Bhutan pun menjalankan beberapa proyek manajemen pengelolaan air, dua diantaranya adalah sektor *hydropower* serta irigasi dan sumber daya terbarukan.

Pertama yaitu proyek *hydropower*. Memang salah satu proyek yang paling bersejarah adalah proyek *hydropower* yang pembangunannya merupakan hasil kerjasama antara pemerintah India dengan pemerintah Bhutan. Proyek kerjasama ini telah dimulai pertama kali pada tahun 1961, yang ditandai dengan penandatanganan *Jaldhaka Agreement* (Roya Bhutanese Embassy, 2016). Proyek Jaldhaka ini dibangun di wilayah India, tepatnya di Bengal Barat, yang kemudian sebagian energi yang dihasilkan di ekspor ke wilayah selatan Bhutan (Roya Bhutanese Embassy, 2016). Proyek ini pun menjadi titik awal kerjasama proyek *hydropower* di tahun-tahun selanjutnya. Proyek *hydropower* yang paling terkenal adalah *Chhukka Hydropower Project* yang selesai pada tahun 1988 (Druk Green, 2017). Proyek ini merupakan proyek terbesar pertama Bhutan, yang biayanya ditanggung oleh pemerintah India, yaitu dengan proporsi 60% berupa hibah dan 40% berupa pinjaman yang dapat diangsur selama 15 tahun (Roya Bhutanese Embassy, 2016). Proyek *hydropower* terbaru adalah *Mangdechu*

Project yang diresmikan pada bulan November 2018 (Lamsang, 2018).

Cara Bhutan dalam menghargai dan memanfaatkan air secara baik, yang salah satunya melalui proyek *hydropower*, menggambarkan bahwa adanya keterkaitan secara spiritual masyarakatnya dengan ekosistem (Chhopel, 2014). Menurut Cameron Ironside dalam artikelnya yang berjudul “*Bhutan and hydropower: can public happiness drive policy?*”, menyatakan bahwa kebijakan pembangunan *hydropower* merupakan salah satu contoh implementasi ketika kebahagiaan menjadi salah satu elemen penting dalam pembuatan kebijakan (Ironside, 2014). Bahkan menurut Tinley Dorji, direktur eksekutif *Dagachhu Project*, mengatakan bahwa *hydropower* merupakan tulang punggung Bhutan, yang tidak lepas dari kontribusi pada pemasukan dan pembawa kebahagiaan (Mallet, 2014). Hal ini dapat dibuktikan dengan analisis empat pilar GNH.

Dari sisi keadilan sosial, *hydropower* dapat secara adil menghasilkan energi untuk kebutuhan masyarakat dan industri (Ironside, 2014). Kedua dari segi lingkungan, dimana proyek ini memiliki sisi keberlanjutan. Karena selain memberikan kontribusi besar terhadap pemasukan negara melalui ekspor energi, *hydropower* ini ramah lingkungan. Ketiga yaitu menjaga tradisi, dimana proyek ini sama sekali tidak merubah tradisi masyarakat Bhutan yang sudah terbiasa saling bergantung dan berdampingan dengan alam. Justru proyek ini menjadi salah satu penunjang terlestarikannya tradisi berdampingannya masyarakat Bhutan dengan alam. Keempat yaitu *good governance*, dimana proyek ini merupakan bagian dari respon pemerintah Bhutan dari kebutuhan masyarakat

akan listrik dan konsumsi. Perdana Menteri Bhutan, Tshering Tobgay, pun mengatakan bahwa proyek *hydropower* ini sekaligus juga diharapkan menjadi contoh dan menarik investasi bagi negara-negara di dunia dalam hal penerapaaan energi ramah lingkungan (Mallet, 2014).

Kedua yaitu pembangunan irigasi, yang salah satu contoh proyeknya adalah *The Lingmutey Chhu Watershed Project*. Proyek ini merupakan hasil kerjasama dari pemerintah Bhutan dengan *International Development Research Center (IDRC)* dan *The Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)* (Singh & Karki, 2004). Adanya proyek ini dilatarbelakangi oleh keluhan para petani akibat sering kekurangan air ketika musim kemarau, yang berakibat timbulnya konflik untuk saling berebut mendapatkan air (Singh & Karki, 2004). Tidak hanya lokal, permasalahan ini sudah meluas ke hampir seluruh wilayah Bhutan. Oleh karena itu pemerintah Bhutan melalui Kementerian Pertanian dan Perhutanan Bhutan menginisiasi proyek kolaborasi ini. Diharapkan proyek ini dapat meningkatkan produksi pertanian dengan memperluas distribusi air irigasi dan menyelesaikan konflik yang terjadi akibat adanya perebutan sumber antar petani (Bhutan Water Partnership, 2016). Kebijakan ini juga dapat dinilai memenuhi keempat pilar dari *Gross National Happiness*. Proyek ini dapat dinilai sebagai representasi dari *good governance*, karena pembangunannya dilaksanakan sebagai bentuk respon pemerintah Bhutan untuk menyelesaikan keluhan dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Selain memiliki dampak ekonomi yang adil bagi masyarakat, proyek ini ramah lingkungan dan menjadi salah satu penunjang pelestarian tradisi masyarakat Bhutan.

4.3.2 *Gross National Happiness Centre Bhutan*

Bhutan juga membentuk organisasi non-profit yang dipimpin oleh Putri Ashi Kezang Choden Wangchuck dengan nama *Gross National Happiness Centre Bhutan* (GNH Centre Bhutan, 2018). Tujuan dari dibentuknya organisasi non-profit ini adalah untuk mengenalkan sekaligus mempromosikan GNH sebagai sebuah indeks alternatif pembangunan. Salah satu usaha untuk mempromosikan dan mengenalkan GNH adalah dengan bekerjasama dengan *Schumacher College*. Salah satu bentuk programnya adalah *The GNH Masterclass*. Adanya program ini dilatarbelakangi oleh keunikan Bhutan yang semakin mendapat perhatian dunia internasional, yaitu paradigma pembangunannya dan indeks pembangunan alternatif *Gross National Happiness* (Schumacher College, 2017). Sehingga para peserta akan diajak untuk merasakan bagaimana hidup di negara dengan kebahagiaan sebagai ‘roh’ utama dari kehidupan dan pembangunannya.

4.4 *Gross National Happiness Sebagai Alternatif Indeks Pembangunan Global*

Usaha Bhutan dalam memperkenalkan GNH sebagai bentuk *counter-discourse* terhadap GDP pun tidak sia-sia. Dunia internasional mulai menaruh perhatian terhadap aspek kebahagiaan dalam pembangunan. Pendekatan pembangunan dari GNH membuat berbagai pihak tertarik untuk mempelajari lebih dalam, memberikan pengakuan, hingga ikut mempromosikannya. Secara perlahan, GNH mulai mendapat tempat di dunia internasional sebagai sebuah indeks pembangunan alternatif selain GDP. Beberapa bukti bahwa dunia internasional mulai menjadikan GNH sebagai alternatif indeks pembangunan, yaitu:

4.4.1 *World Happiness Report*

Salah satu bukti bahwa dunia internasional telah mulai peduli pada kebahagiaan adalah dengan terbitnya *World Happiness Report* untuk pertama kalinya pada tahun 2012 (Schultz, 2017). Laporan ini merupakan hasil dari *UN High Level Meeting on happiness and well-being* yang diselenggarakan pada tahun 2012 (Helliwell, Layard, & Sachs, 2017). Pertemuan yang dipimpin oleh Bhutan tersebut dihadiri oleh 800 peserta, termasuk kepala negara, delegasi negara, organisasi internasional, hingga akademisi (Bhutan, 2012). Bahkan Profesor Joseph Stiglitz, Profesor Jeffrey Sachs, dan Direktur Eksekutif *UN Women* Michelle Bachelet turut menjadi pembicara dalam sesi panel diskusi pertemuan tersebut (Bhutan, 2012). Adanya laporan ini bertujuan agar kebahagiaan dapat menjadi tolok ukur dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, sekaligus menjadi salah satu pertimbangan utama dari kebijakan publik bagi negara-negara di dunia (Helliwell, Layard, & Sachs, 2017). Pendapatan, harapan hidup, angka korupsi, dan kemurahan hati pun menjadi beberapa elemen yang digunakan dalam *World Happiness Report* untuk mengukur tingkat kebahagiaan negara (International Day of Happiness, 2018).

Dengan tujuan untuk terus mengingat pentingnya kebahagiaan, tanggal 20 Maret ditetapkan sebagai hari kebahagiaan dunia. Penetapan ini didasarkan atas resolusi PBB "*International Day of Happiness*", sebagai hasil dari *UN Conference on Happiness* pada tanggal 12 Juli 2012 (United Nations, 2012). Bhutan sebagai negara yang dikenal sangat menaruh perhatian pada kebahagiaan pun menjadi negara yang menginisiasi resolusi tersebut (United Nations, 2012). Sejak saat itu pula laporan indeks

kebahagiaan negara-negara di dunia selalu terbit dan diperbaharui data-datanya setiap tahun. Adanya pengakuan terhadap pentingnya kebahagiaan ini didukung oleh berbagai pihak. Salah satunya adalah direktur *United Nations Development Programme* (UNDP) yang menolak “*tyranny of GDP*” dengan berpendapat bahwa kebahagiaan harus menjadi fokus utama agar dapat membangun manusia dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan (Helliwell, Layard, & Sachs, 2017). Bahkan pada tahun 2016, *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) pun berkomitmen untuk menempatkan kesejahteraan sebagai aspek utama yang diperjuangkan oleh pemerintah negara (Helliwell, Layard, & Sachs, 2017).

4.4.2 GNH Sebagai Bentuk Aspirasi dari Tujuan Pembangunan Global

Pada tahun 2011 Majelis Umum PBB memberikan ijin Bhutan untuk dapat mengenalkan filosofi *Gross National Happiness* kepada negara-negara lain dalam sesi panel untuk berbicara tentang kesejahteraan dan kebahagiaan (United Nations, 2011). Bahkan dalam *non-binding resolution* PBB “*Happiness: towards a holistic approach to development*” dinyatakan pula bahwa kebahagiaan sebagai tujuan universal dianggap sebagai salah satu bentuk aspirasi dan refleksi dari *Millenium Development Goals* (MDGs) (United Nations, 2011).

GNH juga dianggap sebagai representasi dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dibandingkan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, GNH pun dinilai lebih komprehensif dengan fokusnya pada ekonomi, budaya,

lingkungan, dan emosi individu. Hasilnya pada tahun 2016 pemerintah Bhutan bersama dengan PBB melakukan kerjasama untuk menyelesaikan *the Himalayan Kingdom's 12th Five Year Plan* (UNDP, 2016). Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk menciptakan tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan lebih berorientasikan hasil, serta agar proses pembangunan dengan lebih mudah untuk diukur tingkat kemajuan (*progress*) dan keberhasilannya (UNDP, 2016). Sehingga secara tidak langsung PBB telah mengakui GNH sebagai sebuah alternatif indeks pembangunan dengan implementasi awal dalam bentuk rencana pembangunan nasional.

4.4.3 Internasionalisasi *Gross National Happiness Centre*

Selain dari PBB, GNH juga secara tidak langsung diakui sebagai alternatif indeks pembangunan oleh beberapa negara. Salah satunya yaitu Thailand melalui kehadiran *GNH Centre Thailand*. Pada tahun 2016, pimpinan *GNH Centre Bhutan*, Putri Ashi Kezang Choden Wangchuck, secara langsung melakukan penandatanganan MoU pendirian *GNH Centre* di Thailand (Pattaya Mail, 2016). Kehadiran *GNH Centre* di Thailand ini tidak lepas dari adanya kemiripan antara filosofi GNH dengan *Sufficiency Economy Philosophy* milik Thailand (Sassaman, 2016). *Sufficiency Economy Philosophy* atau SEP sendiri merupakan filosofi pembangunan yang dicetuskan oleh mendiang raja Thailand, Raja Bhumibol Adulyadej, pada tahun 1974 (TICA, 2013). Dicetuskannya filosofi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan tingkat kebahagiaan masyarakat Thailand (Royal Thai Consulate-General India, 2014). Filosofi ini pun memiliki pilar yang kurang

lebih sama dengan GNH, yaitu keseimbangan antara ekonomi, masyarakat, lingkungan, dan budaya (Royal Thai Consulate-General India, 2014). Sehingga karena kemiripan inilah yang membuat GNH diakui oleh Thailand melalui pendirian *GNH Centre Thailand*.